

**PERANAN AUDIT MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
KANTOR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NTT
WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO**

SKRIPSI

Oleh

ASRIYANTI SARIPAH

NIM 105730464114



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**PERANAN AUDIT MNAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENERIMAAN PENDAPATAN DAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
KANTOR BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NTT
WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO**

ASRIYANTI SARIPAH

10573 04641 14

**Diajuka Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjanah Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Audit Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo

Nama Mahasiswa : ASRIYANTI SARIPAH

NIM : 10573 04641 14

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Desember 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Hj. Naidah, S.E., M.Si.
NBM: 710551

Pembimbing II

Mukminatid Ridwan, S.E., M.Si.
NBM: 1286841

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Basulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si, AK,CA, CSP.
NBM. 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ASRIYANTI SARIPAH**, NIM: **10573 04641 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 123/2018, tanggal 15 Rabiul Akhir 1440 H/22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM.
(Rektor Unismuh Makassar) (.....) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....) 
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif Khalid, S.E., M.Si. Ak. CA. (.....) 
2. Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M. (.....) 
3. Muchriana Muchran, S.E., M.Si. Ak. CA. (.....) 
4. Samsul Rizal, S.E., M.M. (.....) 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIYANTI SARIPAH

Stambuk : 10573 04641 14

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : Penerapan Audit Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

15 Rabiul Akhir 1440 H
Makassar, 22 Desember 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,



Asriyanti Saripah
10572 04641 14

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM : 993078

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak CA.
NBM : 107 3428

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Pengetahuan adalah kekuatan, dan

Pendidikan merupakan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan

Kupersembahkan Kariyah Sederhana Ini Untuk:
Ayahanda Tercinta Dan Alm. Ibunda Tercinta
Suamiku, Anaku Dan Saudara-saudaraku
Sebagai Jawaban Atas Kepercayaan
Yang Telah Di Amanahkan Kepadaku, Serta
Seluruh Keluarga Besarku Dan Teman-Temanku
Yang Senantiasa Mendo'akan Dan Membantu
Atas Keberhasilanku

Do'amu,,,,,,,,,

Pengorbananmu,,,,,,,,,

Nasehatmu,,,,,,,,,

Serta kasih sayangmu yang tulus

Menjunjung keberhasilanku

Dalam Mencapai cita - cita

ABSTRAK

ASRIYANTI SARIPAH, 2018, Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan dan Pengelola keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Naidah dan Pembimbing II Mukminati Ridwan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan melihat tingkat efektivitas dan efisien yang ada di Kantor Bada Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, Data yang di analisis adalah hasil wawancara dengan bidang pelayanan, pengamatan langsung pada bidang pelayanan dan bidang umum, serta telaah dokumen di kantor Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan dan Pengelola keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo sudah efektif. Karena peranan audit manajemen dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Kata Kunci : Peranan Audit Manajemen, Efektivitas dan Pengelolah Keuangan.

ABSTRACT

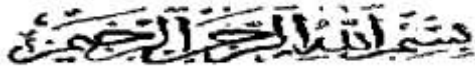
ASRIYANTI SARIPAH, 2018, The Role of Management Audit In Improving the Effectiveness of Acceptance And Financial Management in the Office of the Agance for NTT Ragional Financial and Asset Agency in the Distrct. The Thesis of the Faculty of Economics Accounting Study Program, and The Business Of The University Of Makassar. Guided by Supervised I Hj. Naidah., SE., M.Si Supervised and Advisor II Mukminati Ridwan., SE., M.Si.

This study aims to assess and see level of effectiveness and efficiency in the Office Of The Ntt Ragional Financial And Asset Revenue Agency In Nagekeo District. This type of research used in the study is qualitative, the data analyzed Are the results of interviews with the field of service, direct observation in the field of service and general fields, as well as documents in the Office Of The Ntt Ragional Financial And Asset Revenue Agance In Ngekeo Regency.

The result of this study indicate that the Role of Management Audit In Improving the Effectiveness of Receiving Financial Revenue and Management at the NTT Ragional Office Of Financial And Asset Revenue In Nagekeo District Ragional has been effective. Because the management audit is believed to be able to improve thr company's perofomance in achieving company goals. The benefits obtained are that the company will be more structured.

Keywords : Management Audit Role, Effectiveness.

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan hidayah dan magfirah-Nyalah sehingga meski harus melewati perjuangan yang panjang dan ckup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “ Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Dan Pengelolah Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo ” dapat diselsaikan.

Skripsi yang penulisi buat bertujuab untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) PADA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai kariya ilmiah penulisi menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta penulisi yang terbatas. Namun berkat bantuan arahan serta petunjuk dari Ibu Mukminati Ridwan, SE.,M.Si sebagai pembimbing II dan Ibu Hj. Naidah, SE., M.Si sebagai pembimbing I, yang tulus membimbing penulisi, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal samai selsainya skripsi ini. Gagasan – gagasan beliau yang merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya – upayah beliau sebagai amal kebaikan.

Teristimewah dan Terutama penulisi sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulisi Bapak Mutalib Baikara dan Alm. Ibu Sofia Pila, yang senantiasa memberikan nasehat , bimbinga, motivasi dan do’a agar penulisi dapat menyelesaikan studi dengan baik dan taklupa pula jasa – jasanya dalam melahirkan, membesarkan membina serta mendidik penulisi. Khusus ucapan terima kasih yang tak terhinggah kepada teman hatiku/teman hidupku (suami dan buahhati tercinta) Retno Manggala Saputra , Fiqih Baikara dan saudara – saudara tercinta Jumadin Ramadhan, Sajjidin Abubakar, Ikdar Min Lahubha, Muhamad Dja yang senantiasa memberikan nasehat, bimbingan , motivasi serta pengorbanan waktu, tenaga dan juga materi kepada penulisi dalam melakukan penelitian dan penyelesaian tugas akhir skripsi.

Penulisi menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pila penghargaan yang setinggi –tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,Mm., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM., deKAN Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.SI., AK., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lebih banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
5. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Rekan –rekan mahasiswa Fakultas Enonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit membantunya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah member semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Sripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya kepada para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah – mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 21 Agustus 2018

Penulis

Asriyanti Saripah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penulisan	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Audit Manajemen	6
1. Pengertian Audit Manajemen	6
2. Tujuan Audit Manajemen.....	7
3. Ruang Lingkup Audit Manajemen	8
4. Kertas Kerja Audit	10
5. Peran Pemeriksa Manajemen	11
6. Tahapan Audit Manajemen	12
7. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas	15
8. Fungsi Efisiensi dan Efektivitas	17
B. Pengelola Keuangan Daerah	17
1. Perinsip Penyusunan Keuangan Daerah	20
C. Anggaran Daerah	22
1. Pendapatan Daerah	24
2. Belanja Daerah	26
3. Pembiayaan Daerah	29
D. Penelitian Terdahulu	31

E. Kerangka Pikir	34
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan waktu Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Sumber Data	37
E. Tekhnik Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Visi dan Misi Organisasi.....	40
C. Struktur Organisasi dan Job Description.....	41
D. Hasil Penelitian.....	47
E. PEMBAHASAAN.....	53
V. PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPPKAD	42

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Penelitian Terdahulu	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relative memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh kaerena itu, daerah harus dapat menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang- undangan yang berlaku

Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pemungutan pajak daerah ini harus mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya. Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah, cukup banyak jenis pajak yang dibuat oleh masing masing daerah. Untuk itu agar pajak daerah lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 1997 pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan pajak daerah dan retribusi yang ada sebelum untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan Negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan Negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk tercapainya tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Disamping itu, akibat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada sebagian oknum di lingkungan pemerintahan daerah yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat pemerintahan daerah tersebut yang rendah.

Di sisi lain, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran serta dari fungsi pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di lingkungan fungsi pengawasan atau inspektorat daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota (selanjutnya di singkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Di Wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri berpusat pada BPKP sebagai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Dari berbagai daerah yang ada di Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang menjadi fokus peneliti adalah

Kabupaten Nagekeo, pada kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Berkaitan dengan tugas dasar dan tujuan BPPKAD yang berpedoman pada visi dan misi Dinas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk merumuskan ke dalam penelitian yang berjudul ***“Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pendapatan dan Pengelolah Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo (Samsat).”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : ”Bagaimana peranan audit manajemen dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo?“

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui peranan audit manajemen dalam meningkatkan efektivitas

penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo.”

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu akuntansi khususnya mengenai akuntansi keperilakuan dan audit yang terkait dengan independensi, kompetensi, profesionalisme, dan sensitivitas etika profesi serta kualitas audit. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan praktis bagi organisasi terutama BPK dalam mengelola sumber daya manusianya serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Manajemen

1. Pengertian Audit Manajemen

Pengertian audit manajemen telah banyak dikemukakan oleh para ilmuwan sesuai pemahaman dan sudut pandang yang melatar belakungnya. perbedaan pengertian audit manajemen ini disebabkan oleh disiplin ilmu serta pengalaman pengarang dalam bidang audit manajemen, namun pada dasarnya makna yang sama bahkan perbedaan tersebut akan semakin memperluas cakrawala untuk memahaminya.

Audit manajemen pengevaluasian terhadap efisien dan aktivitas operasi perubahan.(IBK.Bayangkara 2011 : 2). Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.

Audit manajemen sebagai bentuk pemeriksaan, penekanannya adalah proses manajemen khususnya prosedur untuk perencanaan.(Wijaya Tungga 2012 : 25).

Audit manajemen digunakan untuk memastikan seberapa baik manajemen dalam hubungan eksternal dengan pihak luar maupun efisiensi internal.(Yusuf Maulana 2014 : 59).

Audit manajemen sering juga disebut sebagai pemeriksaan operasional, pemeriksaan presentasi (*performance*), pemeriksaan sistem, pemeriksaan efisiensi atau lainnya lagi.Oleh karena itu belum ada pengertian pemeriksaan yang tuntas maka para ahli pun banyak mengemukakan defenisi yang berbeda-beda. Perlu dibedakan antara audit manajemen dengan pemeriksaan operasional, perbedaan tersebut adalah terletak pada titik berat pada pemeriksaan, dimana audit manajemen menitikberatkan pada aspek kualitas dan kemampuan para pengelola atau manajer dalam mengelola sedangkan dalam pemeriksaan operasioanal titik berat pemeriksaan pada aspek kualitas yang dijalankan.

2. Tujuan Audit Manajemen

Tujuan audit adalah : bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut(IBK. Bayangkara 2011 : 2). Berkaitan dengan tujuan ini titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperbaikidi masa yang akan datan, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

Ringkasan audit manajemen dilakukan untuk meyakinkan bahwa organisasi akan berjalan dengan baik, karena audit manajemen sebagai pengendalian mampu mengidentifikasi dari ketidakhematan yang harus di komunikasikan dengan baik kepada manajemen unit. Karena komu swsnikasi ini

sangat bermanfaat bagi manajemen untuk memahami sebab dan temuan negatif, untuk mengurangi resiko kerugian di masa mendatang sehingga prestasi manajemen dapat ditingkatkan.

Tujuan audit manajemen adalah membantu semua anggota manajemen melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif (Elvira 2011 : 2).Audit manajemen menyediakan analisis, penilaian-penilaian, rekomendasi, nasihat dan informasi mengenai kegiatan yang diperiksannya. Pada akhirnya bertujuan untuk membantu setiap masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi perusahaan

3. Ruang Lingkup Audit Manajemen

Audit manajemen dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta efektivitas pencapaian tujuan perusahaan (IBK. Bayangkara 2011 : 2). Oleh karena itu, audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial (perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian) maupun fungsi- fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana pengelolaan berbagai program/ aktivitas pada setiap fungsi bisnis perusahaan, apakah sudah dikelola dengan prinsip-prinsip kehematan, efisien, dan secara efektif dapat mencapai tujuannya? Hal ini merupakan kajian dari audit manajemen. Periode audit juga bervariasi, bisa juga jangka waktu satu minggu, beberapa bulan, satu tahun bahkan untuk beberapa tahun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. (Elvira 2011 : 12). Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan

atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang dilakukan.

Lingkup pemeriksaan manajemen meliputi suatu organisasi, program, kegiatan atau fungsi yang mencakup (Agus, 2012 : 14-16) :

a. Keuangan dan kepatuhan , menentukan :

- 1) Apakah laporan keuangan suatu kesatuan ekonomi yang diperiksa menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil-hasil kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum, dan.
- 2) Apakah kesatuan ekonomi mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang secara material mempengaruhi laporan keuangan.

b. Kehematan efisiensi, menentukan :

- 1) Apakah kesatuan ekonomi mengelola dan memanfaatkan sumber-sumbernya (misalnya: karyawan, kekayaan, ruangan) secara hemat dan efisien
- 2) Penyebab praktik-praktik dan tidak hemat, dan
- 3) Apakah kesatuan ekonomi tersebut mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan kehematan dan keefisienan.

c. Hasil-hasil program, menentukan:

- 1) Apakah hasil-hasil atau manfaat-manfaat yang ditentukan oleh badan otoritas lainya dapat tercapai, dan
- 2) Apakah pelaksanaan (*agency*) mempertimbangkan alternatif-alternatif pencapaian hasil yang diinginkan dengan biaya yang rendah.

4. Kertas Kerja Audit (KKA)

Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit (IBK. Bayangkara 2011 : 2). Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit.

Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah audit yang ditempuh Menurut IBK. Bayangkara (2010:23) :

- a. Rencana audit
- b. Pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas system control internal.
- c. Prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan yang dicapai.
- d. Penelahaan kertas kerja audit oleh penyedia.
- e. Laporan audit.
- f. Tindak lanjut dari tindakan perbaikan

Dokumentasi pemeriksa meliputi kegiatan menghimpun dan mencatat data yang berhubungan dengan tujuan-tujuan audit. Tipe dokumentasi umumnya meliputi bagan, analisa keuangan, laporan interen, dan berbagai catatan yang dikumpulkan selama audit operasional. Dokumen pemeriksaan pada umumnya terdiri atas :

- a. Program kerja audit.
- b. Dokumentasi yang diperoleh selama tahap pengumpulan data.
- c. Wawancara dan pengamatan fisik.
- d. Kuisisioner dan pengamatan fisik.
- e. Memoranda yang dibuat oleh pemeriksa selama tahap analisa.
- f. Kuisisioner yang berasal dari wawancara mendalam dengan pegawai departemen.
- g. Memoranda yang disusun selama tahap analisa audit yang mendalam.

5. Peran Pemeriksa Manajemen

Kredibilitas profesional dan pengalaman manajemen audit yang harus mampu secara menyeluruh memahami operasi yang di audit (IBK. Bayangkara 2011 : 2). Ini berarti bahwa auditor manajemen yang efektif harus telah mengembangkan kemampuan belajarnya, keterampilan pekerjaan audit dan pengalamannya ekstensif dari sistem pengendalian manajemen dan praktikum yang banyak usaha yang berlainan. Kelompok atau tim manajemen audit perlu merangkul kompetensi berbagai profesional seperti : auditing, akuntansi, aplikasi computer, dan konsultan manajemen.

Manajemen audit harus mempunyai pandangan manajemen. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan manajemen dan semangat untuk mengidentifikasi tujuan manajemen dan semangat untuk membuat perbandingan yang berani dari pandangan yang unit untuk mengujinya secara efektif. Suatu pertimbangan audit yang merupakan dasar dan keputusan tindakan manajemen harus disajikan dengan keyakinan.

6. Tahapan Audit Manajemen

- a) Tahapan dalam audit manajemen menurut Agoes, adalah :
- a. Survei Pendahuluan (*Preliminary Survey*)
 - b. Penelaahan dan pengujian atas system pengendalian manajemen (*Review and*)
 - c. Pengujian terinci (*Detailed Examination*).
 - d. Pengembangan laporan (*Report Development*)
- b) Tahapan audit manajemen menurut Agoes, (2012:20) adalah :
- a. Usulan dan pengenalan

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum, perusahaan yang di sulit seharusnya tidak memandang pemeriksaan manajemen dari sudut pandang yang kritikal dan negatif. Pertemuan awal auditor dengan manajemen sangat membantu dalam menetapkan hubungan baik antara mereka selama fase audit. Selama itu, audit mengenai tujuan organisasi secara keseluruhan, agar dapat menilai tiap aktifitas, unit atau fungsi dalam organisasi. Berdasarkan hal tersebut, auditor harus memperoleh suatu pemahaman mengenai tujuan audit organisasi yang di audit.

Sebagai tambahan, auditor harus mendapatkan dan menelaah informasi yang lain, seperti aktifitas yang dilaksanakan, tipe pengendalian yang di implementasikan, struktur organisasi dan posisi unit organisasi serta bidang pemisahannya dalam organisasi secara keseluruhan. Fase ini juga termasuk menelaah data yang kuantifikasi, laporan manajemen dan laporan lain untuk mengidentifikasi kecenderungan dan area masalah yang mungkin timbul.

b. Survey Pendahuluan

Survey pendahuluan harus dilakukan pada permulaan audit. Selama fase ini audit melakukan penilaian pendahuluan atas aktifitas yang diuji. Pada fase ini

juga pernyataan yang relevan dapat diajukan kepada manajemen operasi. Informasi yang diperoleh adalah informasi data keuangan, rencana dan anggaran serta sistem pelaporan yang di percayai oleh manajemen untuk memonitor kinerja. Auditor harus menggunakan kuisisioner yang tepat untuk membantu dalam mengidentifikasi area yang dimaksud.

c. Penelaah Pendahuluan

Selama fase penelaah pendahuluan, pengujian yang terbatas dilakukan untuk untuk menilai keabsahan pandangan-pandangan yang diperoleh pada fase sebelumnya. Aktifitas atau area fungsional untuk audit yang detail kemudian diidentifikasi. Kriteria kinerja yang diukur harus ditetapkan. Biasanya pekerjaan biasanya pekerjaan dilakukan selama ini akan mungkin memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai tipe staf dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit secara lengkap. Puncak fase ini adalah merumuskan dan mendesain suatu program kerja yang rinci untuk audit yang lebih mendalam.

d. Pengujian yang lebih rinci

Selama fase ini memuktahirkan, kelengkapan dan akurasi data akan ditentukan. Pengujian audit yang lebih rinci dapat diarahkan terhadap :

- 1) Apakah sasaran dan tujuan akan dicapai dengan anggaran yang telah diotorisasi
- 2) Apakah informasi yang penting dan dapat dipercaya tersedia bagi manajemen tepat pada waktunya dan apakah informasi tersebut digunakan.
- 3) Apakah biaya aktifitas operasional secara wajar sepadang dengan manfaat yang dicapai.
- 4) Apakah aktivitas operasional terus menerus memenuhi kebutuhan target yang di tetapkan.

5) Apakah terdapat suatu kebutuhan yang berkesinambungan untuk aktifitas tersebut.

e. Mengembangkan dan menelaah temuan audit.

Audit, diperlukan analisis yang cermat terhadap kondisi dan keadaan yang diidentifikasi. Salah satu teknik yang digunakan untuk meyakinkan bahwa terdapat kondisi yang perlu dilaporkan dan signifikan adalah menelaah secara kritis semua bukti pendukung unsur temuan. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada unsur berikut :

- 1) Kondisi, situasi atau praktik yang diidentifikasi yang memberi kontribusi yang lebih kecil dari pada hasil yang digunakan.
- 2) Kriteria sasaran, tujuan, standar, aturan, atau petunjuk yang lain tidak dicapai.
- 3) Penyebab keadaan atau praktik yang hasilnya kurang dari yang diharapkan.
- 4) Dampak material, kerusakan atau biaya yang timbul akibat kinerja yang diinginkan tidak dicapai.
- 5) Kesimpulan pendapat atau opini auditor atas situasi, keadaan atau praktik organisasi.
- 6) Rekomendasi tindakan korektif atau alternative lain yang diusulkan yang akan meningkatkan kinerja yang lebih efektif.

f. Pelaporan

Pelaporan merupakan fase berikutnya dan merupakan fase yang kritical dan pemeriksaan manajemen. Laporan pemeriksaan manajemen merupakan alat yang formal untuk memberitahukan manajemen puncak tentang temuan auditor yang signifikan serta rekomendasinya yang sangat bahwa laporan pemeriksaan manajemen harus secara jelas menyatakan tujuan, ruang lingkup, pendekatan umum dan prosedur yang digunakan.

g. Tindak lanjut setelah audit

Tujuan dari penelaah tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi yang dimasukkan dalam laporan audit benar-benar telah dilaksanakan. Apabila manajemen tidak melakukan tindakan korektif yang dimaksud, maka cari penjelasan tentang kegagalan manajemen tersebut.

7. Pengertian Efisiensi dan Efektifitas

Usaha yang sangat kompetitif akhir-akhir ini apabila dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, maka konsekuensinya, masalah efisiensi dan efektifitas menjadi isu yang signifikan. Untuk memahami secara detail tentang kedua hal tersebut maka Mc Leod yang dikutip oleh Azhar Susanto Memberikan definisi mengenai syarat efisiensi dan efektifitas tidaknya suatu organisasi. Beliau menyatakan bahwa kegiatan usaha suatu organisasi atau unit dikatakan efisiensi jika:

- a. Dalam melaksanakan kegiatannya telah dikonsumsi sumber-sumber atau biaya yang lebih kecil untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah tertentu, atau
- b. Melaksanakan kegiatannya, telah dikonsumsi sumber-sumber dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang besar.

Efektifitas adalah sejauh manunit yang dikeluarkan maupun mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan yang telah di tetapkan.(Mahmudi 2010,143-166).

Efisiensi adalah suatu proses yang mengukur dan membandingkan keluar dan masukan. Atau mengukurperbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan.(Mahmudi 2010,143-166)

Agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan efektif, maka kegiatan tersebut perlu direncanakan, dikordinasi dan dikendalikan. Oleh karena itu, sistem perencanaan dan pengendalian manajemen harus dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen, Dianjung, (2009 : 53) menjelaskan bahwa: efisiensi adalah tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Jadi sebenarnya pengertian efisiensi berhubungan dengan metode operasi. Dengan kata lain seandainya ingin menilai apakah suatu kegiatan atau operasi telah dijalankan secara efisien (berdaya guna) atau tidak, maka dapat dideteksi melalui pertanyaan : “Apakah suatu kegiatan dilaksanakan dengan cara terbaik tanpa memerlukan tambahan biaya?. Apakah pertanyaan tersebut di tarakan pada suatu kegiatan dan mempunyai jawaban “ ya” maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien.

Pengertian efisiensi memperlihatkan segi output atau keluaran, maupun segi input atau masukan. Dengan kata lain suatu kegiatan dikatakan telah efisien jika pelaksanaan kegiatan telah sesuai mencapai sasaran. Pengertian efisiensi berkaitan dengan hasil operasi. Dengan kata lain menilai apakah suatu kegiatan operasi telah dijalankan secara efektif berhasil guna atau tidak dapat dideteksi dengan pertanyaan : “Apakah pelaksanaan sutu kegiatan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan?”. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif.

8. Fungsi Efisiensi dan Efektifitas

Menurut Agoes (2010 : 182) efisien adalah jika dengan biaya (input) yang sama dicapai hasil (output) yang lebih besar maka hal tersebut disebut efisien. Jadi efisien merupakan ukuran proses pencapaian optimalisasi sumber daya

yang dimiliki terhubung antara input dan output dalam operasional perusahaan. Dengan metode kerja yang baik maka akan dapat memandu dalam proses operasi yang optimal dan akan mendapatkan hasil output yang lebih besar dan dapat meminimalkan penggunaan sumber daya manusia di dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan.

Efisiensi merupakan konsep input-output seorang manajer yang efisien merupakan orang yang mencapai output atau hasil yang diukur dengan input (tenaga kerja, material, dan waktu) yang digunakan manajer yang bertindak secara efisien maupun meminimalkan biaya sumber daya yang diperlukan.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna/anggaran barang untuk melaporkan seluruh transaksi kedalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis obyek, dan rincian obyek pendapatan. Sampai sejauh ini Indonesia belum di atur mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah yang merupakan acuan untuk menyusun dan membuat pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun ditahun 2002 dan tahun 2003 telah dilakukan dengan sejumlah degar pendapat public atas 11 rancangan publikasikan mengenai standar akuntansi keuangan pemerintah. Namun samapi sekarang belum ada pengesahannya sehingga berdampak pada penyusunan, pelaporan

keuangan dan juga audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. (Afiah 2009:23).

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penanggungjawaban keuangan daerah (Halim 2009:30).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah mengeluarkan PP. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menjelaskan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih.

Dengan demikian pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) dan dana Desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

1. Prinsip Penyusunan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, penyusunan Keuangan Daerah mengacu pada norma dan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi

masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakannya kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

d. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan pendapatan rendah secara proporsional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat Azas

APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah didalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

C. Anggaran Daerah

Anggaran Daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. (Oleh karena itu, Anggaran Daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam mendiagnosis permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dimiliki, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. Anggaran harus meliputi semua operasi fiskal pemerintah dan harus mendorong keputusan kebijakan yang mempunyai implikasi keuangan untuk mengatasi kendala anggaran belanja dalam persaingan dengan permintaan (demand) lain. Disiplin juga mengimplikasikan bahwa anggaran seharusnya hanya menyerap sumber daya yang perlu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, jadi APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. (Adisasmita 2011,4) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi 1) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, 2) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu anggaran daerah, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun. (Halim, 2009:18)

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: 1) pendapatan daerah, 2) belanja daerah, 3) pembiayaan daerah.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Penerimaan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam tahun tertentu. (Pranomo2010 :30) anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk uang selama periode tertentu (satu tahun). Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantupengambilankeputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan sebagai alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

“Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 menegaskan penerimaandaerah dalam rangka membiayai kegiatan daerah terdiri dari PendapatanDaerah dan Pembiayaan”, yaitu:

Pendapatan Daerah terdiri dari;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan seperti penjualan asset kendaraan dinas dan lain-lain;

- b) Jasa giro;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing;
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

1. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21;
- d) Sumber daya alam kehutanan;
- e) Pertambangan umum;
- f) Perikanan;
- g) Pertambangan minyak bumi;
- h) Pertambangan gas bumi;
- i) Pertambangan panas bumi;

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

4. Lain-lain Pendapatan terdiri dari:

- a) Pendapatan hibah; dan
- b) Pendapatan Dana Darurat seperti bencana alam.

2. Belanja Daerah

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Istilah belanja pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran (Mahmudi, 2009:87). Kebijakan umum belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (pasal 18, ayat (1,2)

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian, terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah, salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif adalah pendistribusian pengeluaran yang merata.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai. Besarnya proporsi tersebut memberikan suatu petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terkait dengan anggarannya, akan langsung berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah berjalan melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada

kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjasinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.

Pengelompokan belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 meliputi :

- 1) Belanja Aparatur:
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c) Belanja Modal
- 2) Belanja Publik
 - a) Belanja Administrasi Umum
 - b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - c) Belanja Modal
 - d) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - e) Belanja Tidak Tersangka

Belanja daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Bunga;
 - c) Subsidi;
 - d) Bantuan Sosial
 - e) Belanja Bagi Hasil
 - f) Bantuan Keuangan
 - g) Belanja Tidak Terduga.

- 2) Belanja Langsung
 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Barang dan Jasa
 - c) Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Untuk itu dalam keadaan APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan Daerah diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu: a) Penerimaan Pembiayaan, dan b) Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto.

a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:

- 1) Penggunaan Silpa tahun lalu
- 2) Pencairan Dana Cadangan
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
- 5) Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah lainnya
- 6) Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank
- 7) Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
- 8) Pinjaman Dalam Negeri-Pengeluaran Obligasi Pemerintah Daerah
- 9) Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
- 10) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara
- 11) Penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah
- 12) Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- 3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- 4) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank

- 5) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
- 6) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi Pemerintah Pusat
- 7) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
- 8) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
- 9) Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
- 10) Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

D. Penelitian Terdahulu

NO	TAHUN	PENELITI	MASALAH PENELITIAN	HASIL /TEMUANAN	HAL	PENERBIT
1.	2009	Rozani	hasil penerimaan pajak-pajak daerah tidak elastis sepanjang waktu dan berfluktuasi serta signifikan terhadap perkembangan PDRB	menyatakan hasil penerimaan pajak-pajak daerah semestinya harus elastis sepanjang waktu dan tidak berfluktuasi serta signifikan terhadapPerkem bangan PDRB, sedangkan respon perkembangan penerimaan PAD di suatu daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk sumber dana daerah dalam memenuhi permintaan barang sosial dan pelayanan, seharusnya memiliki elastisitas yang tinggi terhadap perkembangan PDRB	25,155	Universitas Indonesia

NO	TAHUN	PENELITI	MASALAH PENELITIAN	HASIL /TEMUANAN	HAL	PENERBIT
2.	2010	Syahelmi	menganalisis perkembangan posisi kemampuan keuangan daerah propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.	perkembangan posisi kemampuan keuangan daerah propinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Studi ini dibatasi pada sisi pendapatan dan berfokus pada aspek PAD provinsi. Dengan menggunakan metode Perhitungandan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Elastisitas, Efektifitas, dan Efisiensi; Untuk melihat elastisitas PAD terhadap PDRB Sumatera Utara Metode Regresi linear sederhana dengan data yang berbentuk <i>time series</i> dari tahun 2000 sampai 2005	120	Universitas Indonesia
NO	TAHUN	PENELITI	MASALAH PENELITIAN	HASIL /TEMUANAN	HAL	PENERBIT

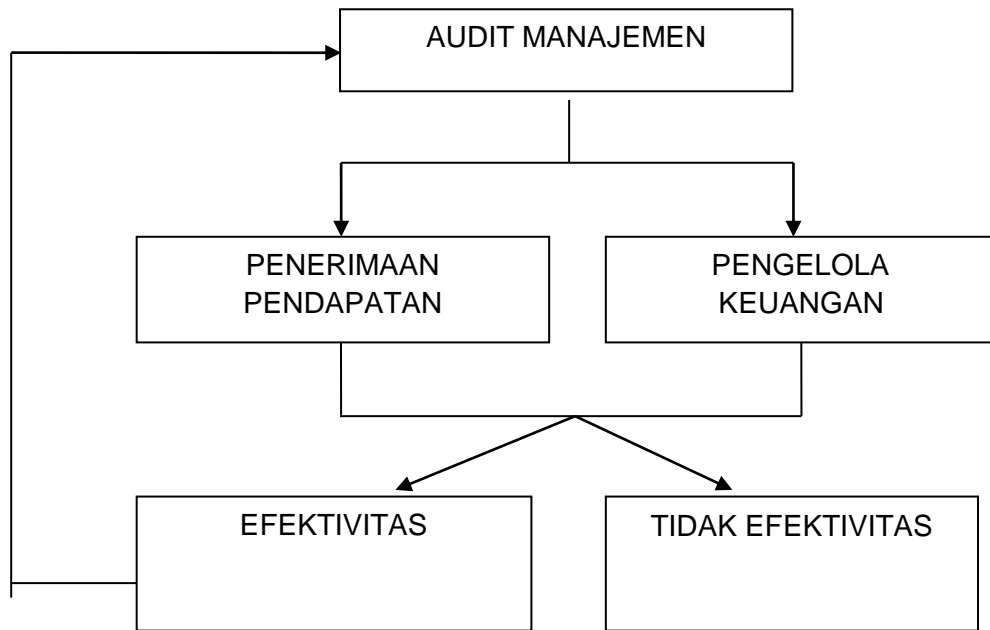
3.		Ali Hasmi	menganalisis struktur hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dari sisi penerimaan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, kemudian menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan keamatan hubungan realisasi penerimaan dengan pengeluaran rutin	mengadakan penelitian dengan menganalisis struktur hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dari sisi penerimaan dana transfer seperti Dana Alokasi Umum, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, kemudian menganalisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD.	114	Universitas Indonesia
----	--	-----------	--	---	-----	-----------------------

E. Kerangka Pikir

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekarang ini lebih dipopulerkan dengan sebutan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/ Kota (selanjutnya di singkat dengan Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting auditor inspektorat dan pimpinan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkoordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan efektivitas manajemen audit dalam mengawasi system keuangan daerah, yaitu *value for money*, yaitu melakukan optimalisasi anggaran secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dengan dilakukannya pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Menggunakan deskriptif-kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian ini ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Menggunakan deskriptif-kualitatif juga karena data yang penulis kumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip. Sesuai dengan judul penelitian, maka intinya penelitian ini hanya meneliti satu masalah saja yaitu tentang bagaimanakah peran audit manajemen dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo dalam pengelolaan asset daerah dalam hal ini asset keuangan.

B. Lokasi dan waktu penelitian.

Lokasi penelitian merupakan obyek yang menjadi focus penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo, Kota Mbay, Nusa Tenggara Timur. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo adalah, karena :Lokasi tersebut merupakan dinas yang berwenang dalam pengelolaan asset

daerah sehingga berkompeten dalam menjawab permasalahan seputar pengelolaan asset daerah. Selain itu masih minimnya penelitian mengenai pengelolaan keuangan dan asset daerah di Kabupaten Nagekeo, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan (lokasi penelitian).
2. Interview, yaitu menggunakan wawancara dengan pimpinan dan staf pegawai terkait dengan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mengadakan penelitian terhadap laporan kegiatan operasional, dan struktur organisasi kantor.

D. Sumber Data

Sumber dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data di peroleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo,
2. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh berupa informasi atau data angka serta dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo.

E. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2011: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 20011: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Seiring dengan pemekaran kabupaten Ngada yang di bagi menjadi 2 kabupaten yakni kabupaten Ngada dan kabupaten Nagekeo, maka demi pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sebagian besar kantor baik instansi vertikal maupun kantor Pemerintah Daerah berpindah dari Bajawa(Kab. Ngada) ke Mbay sebagai ibukota (Kab. Nagekeo).

Demikian pula dengan UPT Ddinas pendapatan Provinsi Wilayah kabupaten Ngada, sebgai personil pindah / instasi ke kabupaten Nagekeo. Seiring dengan terbentuknya UPT Dinas pendapatan Provinsi NTT wilayah kabupaten Nagekeo / kantor SAMSAT Nagekeo pada tahun 2009.

Pada awal keberadaan sehubungan dengan belum tersedianya lahan untuk tempat dibangun kantor UPT Dinas pendapatan / SAMSAT Nagekeo berkantor di Hotel Mandiri / sewa rumah. Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Nagekeo menghibahkan tanah untuk dibangun kantor dan pada awal tahun 2011 mulai berkantor ditempat / gedung yang baru.

Sebagai UPT baru terdapat pembenahan halaman, penambahan sarana dan prasaran kantor antara lain gedung, tempat cek fisik , tempat parkir yang dikerjakan setiap tahun dianggarkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Sampai saat ini pelayanan khusus kepolisian (BPKB, STNK) masih dilayani di Polres Ngada karena Kab. Nagekeo belum memiliki Polres sendiri.

Pada tahun 2016 terdapat perubahan nomenklatur, mengikuti SKPD pusat (provinsi) yang sebelumnya Dinas Pendapatan dan Aset Daerah menjadi Badan Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah, begitupun di UPT terdapat perubahan dari UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Nagekeo menjadi UPT Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT wilayah Kabupaten Nagekeo.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Visi Badan Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo. "Terwujudnya Pengelola dan Pengelola Aset Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel"

2. Misi

Misi Badan Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo.

- a. Meningkatkan Pelayanan Pajak Yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif, Akuntabel.
- b. Meningkatkan Pengelola Aset Melalui Analisa Kebutuhan Dan Penata Usaha.

C. Struktur Organisasi dan Job Description

1. Struktur Organisasi

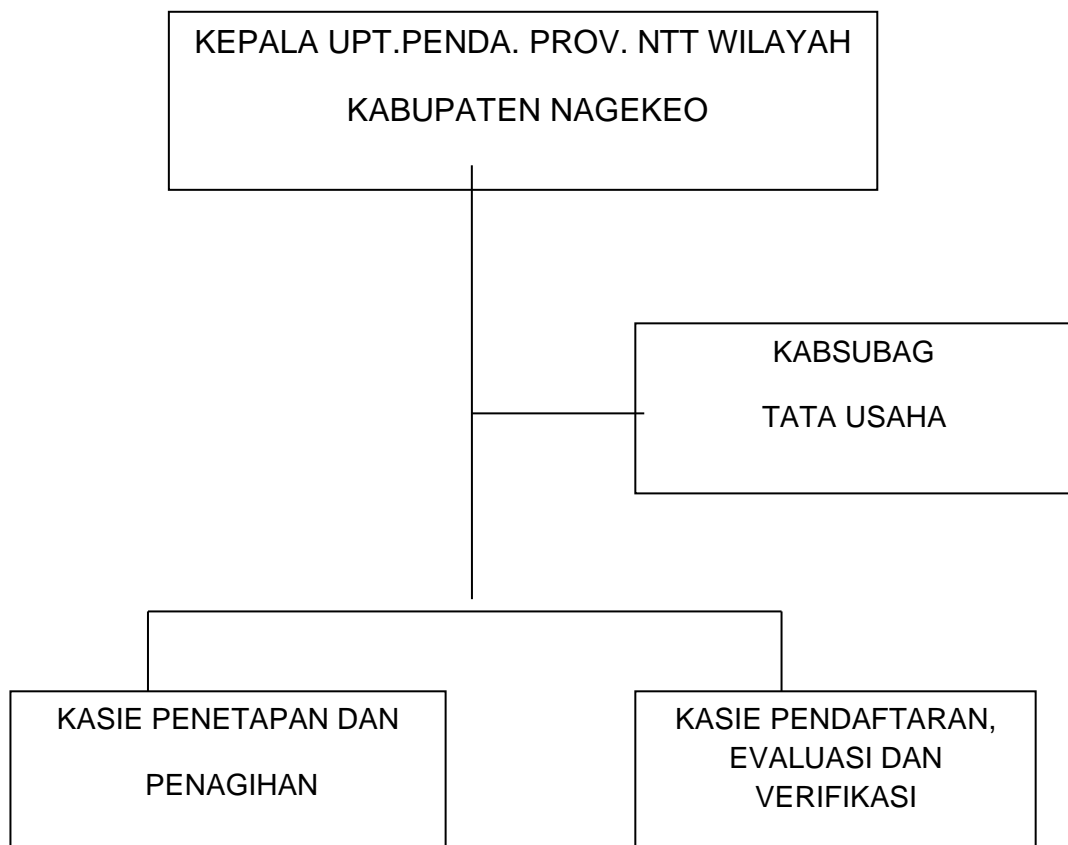
Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung

jawab tiap – tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi sebuah perusahaan maka struktur organisasi memegang peranan yang sangat penting sebab itu dapat di katakan bahwa struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan yang bersangkutan yang efektif dan efisien.

Adapun fungsi dibuatnya struktur organisasi antara lain :

- a) Untuk mengetahui tugas dan weweng dari masing-masing bagian.
- b) Untuk mempertegas kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.
- c) Untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan masing-masing jenjang kepegawaian

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja UPT Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo



2. Job Description

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, tentang tugas dan wewenang tiap bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala / Pimpinan

- 1) Mampu Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.
- 2) Dapat Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO).
- 3) Dapat Memimpin rapat umum, untuk memastikan pelaksanaan tata-tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi ke arah consensus, menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
- 4) Mampu Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
- 5) Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapainya keselarasan dan efektivitas.

b. Kabsubag Tata Usaha.

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (renstra) kantor.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan kantor.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran kantor.

- 4) Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
- 5) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kantor.

c. Kasie Penetapan dan Penagihan.

- 1) Menganalisa data dan informasi guna menyusun potensi dan jenis sumber penerimaan daerah.
- 2) Menjamin setiap penerimaan daerah yang telah diotorisasi dan didisposisi oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Mengawasi penagihan atas setiap tagihan pajak dan retribusi yang jatuh tempoh.
- 4) Mengintensifkan dan mengawasi cara penagihan pajak dan retribusi sehingga mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD tahun berjalan.
- 5) Melaksanakan penatausahaan dan pembukuan setiap penerimaan Pajak, retribusi, dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kasie Pendaftaran, Evaluasi dan Verifikasi

- 1) Menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Memeriksa bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran beserta kelengkapannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Memeriksa kesesuaian antara jumlah dan jenis penerimaan dan pengeluaran dengan DPA.

- 4) Memeriksa dan mengevaluasi pembukuan transaksi keuangan yang telah diverifikasi kedalam buku jurnal, buku besar dan buku pembantu.
- 5) Memeriksa dan menyetujui konsep laporan keuangan dan perhitungan APBD.

D. Hasil Penelitian

a. Peranan Audit Manajemen

Peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah adalah guna mengawasi jalanya system dan prosedur penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah.

Badan pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Nagekeo adalah salah satu kerja perangkat daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Nagekeo. Dalam pengelola keuangan khususnya penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah kabupaten Nagekeo. Yang dilakukan oleh auditor internal yang berkantor di Kantor Pusat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Auditor internal tersebut melakukan audit ke kantor-kantor cabang dan *outlet-outlet* Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah seluruh wilayah NTT termasuk Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo.

Audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah. Dikarenakan dengan audit sangat berperan penting karena tanpa pengawasan dari audit manajemen maka penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah

tidak akan berjalan dengan baik. Bisa saja akan ada penyalahgunaan kebijakan dan lain-lain.

Pengertian pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang diharapkan mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

1. Adapun tujuan dari fungsi pengawasan :

- a. Adaptasi Lingkungan, Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
- b. Minimum kegagalan, Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimalkan kegagalan.
- c. Meminimalkan Biaya, Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimalkan biaya.
- d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi, Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses fungsi pengawasan terdiri dari :

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja: idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan.
- b. Penilaian kinerja : upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula.

- c. Membandingkan kinerja dengan standar :setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penerimaan pendapatan dan pengelola keuangan daerah setiap satu tahun sekali oleh audit manajemen, maka pada tahap ini audit manajemen akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh dibagian penerimaan pendaptan dan pengelola keuangan daerah dengan standar yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah : melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat informasi proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar atau sangat efektif.
3. Tipe-tipe pengawasan
- a. Pengawasan pendahulu : dirancang rancang untuk menagntisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselsaikan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan : pengawasan merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
 - c. Pengawasan umpan balik : mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselsaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan serupa dimasa yang akan mendatang.

Audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah tidak mengalami hambatan. Dikarenakan orang-orang yang termasuk dalam audit manajemen bekerja secara maksimal dan efektif.

Langkah-langkah audit manajemen dalam memaksimalkan kinerjanya : proses audit manajemen dapat menjadi cara terbaik untuk mendapatkan pandangan dari orang luar, yang dapat secara langsung melihat proses audit manajemen dan membantu mengidentifikasi area mana saja yang diperlukan perbaikan, atau membantu audit manajemen merampingkan proses untuk berjalan dengan baik, lebih cepat atau efisien. Berikut ada lima langkah utama proses audit manajemen dan bagaimana langkah-langkah tersebut digunakan oleh pemilik proses audit dalam meningkatkan proses mereka.

1. Perencanaan jadwal audit : bagian terpenting dari suatu proses audit yang baik adalah memiliki jadwal audit yang tersedia untuk membiarkan semua orang tahu kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang (biasanya jadwal tahunan). Jika audit manajemen tidak memiliki rencana dan melakukan audit secara mendadak, hal seperti memberikan kesan bahwa manajemen "sudah tidak percaya lagi dengan karyawannya". Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan adalah bahwa audit datang untuk membantu pemilik proses untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat memungkinkan pemilik proses untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus

meembantu mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan improvement do area lainnya.

2. Perencanaan proses audit : langkah pertama dalam perencanaan audit adalah mengkonfirmasi dengan pemilik proses kapan audit dilakukan. Rencana di atas lebih kepada seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan mengkonfirmasi memungkinkan audit manajemen dengan pemilik proses untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan pada komentar atau masalah sebelumnya ditemukan, dan ketika pemilik proses dapat mengidentifikasi daerah yang perlu diperbaiki maka auditor dapat melihat dan membantu pemilik proses mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pemilik proses akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit yang dilakukan.
3. Melakukan audit :Melakukan audit dengan pertemuan auditor dan pemilik proses dengan memastikan bahwa rencana audit selesai dan siap. Maka ada banyak jalan bagi auditor untuk mengumpulkan informasi selama audit : meninjau catatan, berbicara dengan karyawan, menganalisa dari proses kunci atau bahkan mengamati proses secara langsung.fokus dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti yang direncanakan dalam SMM, dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah satu hal yang paling berharga yang auditor dapat dilakukan untuk pemilik proses, tidak hanya untuk mengidentifikasikan area-area yang tidak berfungsi dengan baik,

tetapi juga untuk menunjukkan proses mana saja yang dapat berfungsi lebih baik jika dilakukan perubahan.

4. Pelaporan audit : penemuan penutupan dengan pemilik proses adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pemilik proses ingin tahu apakah ada kelemahan yang perlu ditangani dan juga untuk mengetahui jika ada proses yang bisa di improve. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis sesegera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan mengidentifikasi tidak hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses tetapi juga area positif dan area yang memiliki potensi untuk improvement, pemilik proses akan mendapatkan nilai tambahan yang lebih baik dari internal audit yang dilakukan, dengan melakukan perbaikan proses dari informasi tersebut.
5. Tindak lanjut atas masalah atau perbaikanyang ditemukan :seperti banyak standar manajemen mutu, tindak lanjut merupakan salah satu langkah penting. Jika masalah telah ditemukan dan tindak lanjut perbaikan dilakukan, lalu meastikan bahwa temuan tersebut telah diperbaiki dan itu merupakan kunci dari perbaikan. Jika improvement adalah melihat berapa banyak proses telah meningkat dari sebelumnya.

b. Penerimaan Pendapatan

PenerimaanPendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat

Ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti berkaitan dengan efektivitas sistem dan prosedur untuk mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Nagekeo , antara lain:

Sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dengan keputusan Mendagri 43 tahun 1999 belum seutuhnya dilaksanakan, belum ada pemisahan proses.

Adatiga tahapan proses :

(1). Proses kebijakan merupakan kewenangan Kepala Daerah pelaksanaannya dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Peraturan Daerah.

(2). Proses penetapan merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah pelaksanaannya sesuai system dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi "Kepmendagri No.43 Tahun 1999".

(3). Proses perizinan dilakukan oleh dinas instansi teknis/pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan surat keputusan Kepala Daerah

c. Pengelolah keuangan

Kuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya

tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja lebih efisien dan efektif terutama dalam merealisasikan penerimaan pendaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pembahasan

1. Peranan Audit Manajemen pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kab. Nagekeo

Audit manajemen pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo dilakukan oleh auditor internal yang berkantor di Kantor Pusat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Auditor internal tersebut melakukan audit ke kantor-kantor cabang dan *outlet-outlet* Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah seluruh wilayah NTT termasuk Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peran audit manajemen pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo dapat dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Independensi

Independensi sangat perlu dimiliki oleh seorang auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, auditor internal yang melakukan audit manajemen pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo telah memiliki independensi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan kedudukan tim audit di perusahaan adalah berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam organisasi manajemen perusahaan atau dapat dikatakan tidak terikat pada bagian tertentu di mengungkapkan pemikiran tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen.

Audit manajemen dilakukan secara bebas dan objektif terhadap semua bagian yang menjadi objek auditnya sesuai dengan bukti-bukti yang diperolehnya agar benar-benar dapat memberikan rekomendasi yang akurat untuk membantu pihak manajemen perusahaan meningkatkan kinerjanya. Pihak manajemen Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo memberikan dukungan penuh kepada tim audit internal yang melakukan audit manajemen dengan memberikan semua bukti-bukti yang diminta oleh tim audit internal tersebut.

2. Kemampuan Profesional

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tim audit internal Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang audit. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang mereka kerjakan. Dan bukan hanya pengetahuan di bidang audit, tetapi juga tentang kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tim audit internal yang melakukan audit manajemen juga seringkali berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak atau karyawan pada bagian yang menjadi objek auditnya. Dengan terpenuhinya kemampuan profesional tersebut, maka tim audit internal yang melakukan audit manajemen pada Badan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mampu bertanggung jawab dan mampu memberikan hasil kerja yang maksimal untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo telah dilakukan secara menyeluruh tentang aspek-aspek kegiatan perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, audit manajemen juga telah dilakukan secara menyeluruh terhadap rencana-rencana kerja serta pengendalian internal perusahaan sehingga audit manajemen tersebut dapat memberikan hasil dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo sudah memadai. Sebelum tim audit internal dari kantor pusat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah datang untuk melakukan audit manajemen, sebelumnya telah dilakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo khususnya bagian-bagian yang akan diperiksa agar mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses

pemeriksaan nantinya agar audit manajemen dapat berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan semua bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta melakukan evaluasi terhadap semua bukti dan informasi tersebut dan mengidentifikasi dan menyusun temuan-temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu, tim audit internal yang melakukan audit manajemen tersebut memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo berdasarkan hasil audit manajemen yang dilakukan. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten Nagekeo menerima rekomendasi dan saran tersebut untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Efektivitas Penerimaan Pendapatan

Selanjutnya ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti berkaitan dengan efektivitas sistem dan prosedur untuk mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Nagekeo, antara lain:

Sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dengan keputusan Mendagri 43 tahun 1999 belum sepenuhnya dilaksanakan, belum ada pemisahan proses. Adatiga tahapan proses :

- (1). Proses kebijakan merupakan kewenangan Kepala Daerah pelaksanaannya dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Peraturan Daerah.
- (2). Proses penetapan merupakan kewenangan Dinas Pendapatan Daerah pelaksanaannya sesuai system dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi (Kepmendagri No.43

Tahun 1999). (3). Proses perizinan dilakukan oleh dinas instansi teknis/pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan surat keputusan Kepala Daerah. Point (1) sampai dengan (3) proses tersebut di atas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain : a. Proses kebijakan masih dilakukan langsung oleh beberapa dinas tanpa melalui prosedur Kepmendagri 43 Tahun 1999 misalnya penundaan, pengurangan ataupun penghapusan pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi daerah. Melakukan pungutan-pungutan tanpa didasari oleh Perda ataupun SK Bupati dimana pungutan tersebut langsung digunakan oleh Dinas yang bersangkutan tanpa melalui prosedur mekanisme keuangan daerah (APBD) sehingga tidak tercatat sebagai PAD. b. Masih adanya pungutan langsung oleh dinas yang tidak melalui proses penetapan oleh Dinas Pendapatan Daerah sehingga sulit dikontrol besarnya pemasukan, disamping itu terjadi perbedaan besar kecilnya pungutan terhadap satu, objek pajak/retribusi terhadap subjek pajak. c. Penyetoran pajak/retribusi daerah tidak dilakukan melalui satu pintu, pada Dinas Pendapatan Daerah tetapi dipungut langsung oleh dinas-dinas tanpa melalui mekanisme yang jelas, sehingga sulit dikontrol pemasukan tersebut dan banyak terjadi pemanfaatan keuangan tersebut tidak sesuai ketentuan prosedur keuangan (digunakan langsung oleh dinas); d. Masih adanya izin-izin yang diterbitkan oleh dinas langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas tanpa adanya pendelegasian wewenang oleh Bupati. Dimana sedianya izin tersebut diproses oleh dinas dan ditandatangani oleh Bupati. Hal ini mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan

sulit mengontrol penerimaan dari dinas tersebut karena proses administrasinya tidak sesuai prosedur, kebijakan, penetapan, penyetoran dan perijinan. 1. Akibat permasalahan point satu diatas sangat mempengaruhi besar kecilnya PAD/ besarnya penerimaan tidak seimbang dengan potensi yang dimiliki. 2. Masalah lain yang dihadapi saat ini dalam system dan prosedur antara lain dengan diberlakukan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mana system anggaran sudah mengacu pada Kepmendagri tersebut dimana dinas-dinas teknis diberikan nomor rekening penerimaan masing-masing tetapi tidak dibarengi dengan penetapan system dan prosedur pungutan yang jelas, hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam mengontrol penerimaan dan pemanfaatan PAD sesuai prosedur/mekanisme anggaran. 3. Apabila dilakukan estimasi potensi melalui pemberian bobot, sistem dan prosedur mendapat bobot yang cukup besar pada saat ini yaitu, 20 dibandingkan dengan peningkatan 2 SDM maupun koordinasi dan penyiapan dana.

2. Pengelolaan Keuangan

Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah NTT Wilayah Kabupaten.Nagekeo dari tahun ke tahun sampai sekarang tetap berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah.Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan

daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nagakeo dari tahun ke tahun sangat efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.:

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan tingginya rata-rata rasio efektivitas dari tahun ke tahun. .Dalam hal kestabilan tingkat efektivitas dari tahun ketahun didapati tingkat efektivitas yang dikategorikan sangat efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan aspek kelembagaan, meningkatkan system pemungutan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD sendiri. Serta terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitas yang sudah baik tetap

terus konsisten terlebih bias meningkat dan mengupayakan efisiensi pengelolaan keuangan daerah ditahun-tahun mendatang.

3. Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu memperhatikan setiap anggaran belanja secara khusus dalam pembelanjaan aparatur pemerintah diharapkan bias efektif dan efisien, dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan.
4. Pemerintah Kabupaten Nagekeo dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afiah. 2009. *Audit Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing. Edisi 4 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Akmal. 2009. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit Edisi Kedua*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.
- Dianjung. 2009. *Manajemen Audit : meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Usaha Nasional*. Bogor.
- Elvira. (2011). *Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Eown, Arthur J, et all. 2008. *Manajemen Keuangan : Prinsip dan Penerapan*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, 2009. *Audit Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- IBK. Bayangkara 2011. *Auditing. Edisi 3 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2011. *Auditing. Buku Satu. Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi 2010. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pranomo 2010. *Pendapat Asli Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi provinsi Jawa Timur*. IPB. Bogor .
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wijaya. Tungga 2012. *Auditing. Edisi 4 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yuwono, Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang : Bayumedia.
- Yusuf Maulana 2014. *Audit Manajemen, Majalah Bisnis dan Iptek*. Vol. 7 no.2, Oktober 2013.

L

A

M

P

I

R

A

N

Hasil Wawancara

- a. Wawancara : Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan dan pengelolah keuangan daerah pada kantor badan pendapatan pengelolah keuangan dan aset daerah?.

Narasumber : guna mengawasi jalannya system penerimaan dan pengelolah keuangan daerah.

- b. Wawancara : Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan pengelolah keuangan daerah pada kantor badan pendapatan pengelolah keuangan dan aset daerah?.

Narasumber : iya.. sangat berperan penting karena tanpa pengawasan dari audit manajemen maka penerimaan pendapataan dan pengelolah keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Bisa saja akan ada penyalahgunaan kebijakan dan lain-lain.

- c. Wawancara : Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dan pengelolah keuangan daerah mengalami hambatan??

Narasumber : Tidak mengalami hambatan dikarenakan orang-orang yang termasuk dalam audit manajemen bekerja secara maksimal.

- d. Wawancara : Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan efektifita dari penerimaan pendapatan dan pengelolah keuangan daerah?.

Narasumber : Meningkatkan kemaksimalan kejar dalam mengawasi penerimaan pendapatan dan pengelolah keuangan daerah. Lebih jeli dalam mengawasi semua laporan penerimaan pendapataan dan pengelolah keuangan daerah.

RIWAYAT HIDUP



ASRIYANTI SARIPAH, dilahirkan di Kolikapa 26-06-1996. Anak keempat dari lima bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Mutalib dan Alm. Sofia. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 sampai 2008 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mbay pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mbay, Tamat Pada Tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri Mbay sampai tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama, penulis diterima pada Jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.